

## Analisis Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

**Aisyah Khairani Lubis<sup>1\*</sup>, Syarifah Khairatun Hisan<sup>2</sup>, Ahmad Wahyudi Zein<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indoneisa

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: [ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id](mailto:ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id)

**Abstract.** The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is a fundamental fiscal policy instrument for realizing national development and public welfare. This study aims to analyze the correlation between APBN management and Indonesia's economic growth, focusing on the effectiveness of government spending and oversight of budget misappropriations. Based on the 2023 audit report by the Supreme Audit Agency (BPK), financial losses due to APBN mismanagement reached IDR 8.2 trillion, highlighting the weakness in financial oversight and transparency. Using a descriptive qualitative approach, this study explores the significance of budget efficiency and the implementation of APBN's fiscal functions in supporting macroeconomic stability. The findings suggest that government spending significantly influences economic growth, yet its effectiveness is heavily dependent on robust monitoring systems and sound fiscal strategies. Therefore, strengthening fiscal transparency and supervision is crucial to prevent state losses and promote equitable development.

**Keywords:** APBN, Budget Efficiency, Economic Growth, Fiscal Supervision, Government Spending

**Abstrak.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama kebijakan fiskal dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pengelolaan APBN dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan fokus pada efektivitas belanja negara serta upaya pengawasan terhadap penyimpangan anggaran. Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan adanya penyimpangan anggaran sebesar Rp 8,2 triliun, menunjukkan lemahnya kontrol dan transparansi. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji pentingnya efisiensi belanja serta implementasi fungsi APBN dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Hasil analisis menunjukkan bahwa belanja negara memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh sistem pengawasan dan kebijakan fiskal yang tepat. Oleh karena itu, transparansi dan penguatan fungsi pengawasan perlu ditingkatkan untuk menghindari kerugian negara dan mendukung pembangunan yang berkeadilan.

**Kata kunci:** APBN, Efisiensi Anggaran, Pertumbuhan Ekonomi, Pengawasan Fiskal, Belanja Pemerintah

### 1. LATAR BELAKANG

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, adalah usulan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN adalah sarana kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk meraih tujuan nasional, seperti meningkatkan pembangunan, pemerataan ekonomi, dan kemakmuran yang merata bagi semua orang di Indonesia (Pandia et al., 2022).

Dalam rangka menyelenggarakan kegiatan negara guna mencapai kenaikan penghasilan, peningkatan penugasan, pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya, dan pada akhirnya tercapainya masyarakat jujur dan sejahtera, materiil dan spiritual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara disusun dengan tujuan untuk menetapkan pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar pengeluaran dan penerimaan negara tetap seimbang.

Belanja pemerintah dapat mendorong produksi ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, sesuai dengan tesis Keynes (Amri, 2020). Pajak, belanja, kegiatan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat semuanya berdampak pada peran pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah juga bertugas memastikan bahwa proses pasar berfungsi dengan benar. Dalam membangun dan memelihara lembaga yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembelaan hak milik, penegakan pertahanan dan keamanan nasional, membangun sistem keuangan yang kuat, dan kerangka hukum yang ketat (Batubara, 2020). Menurut penelitian (Alfiah et al., 2022), defisit anggaran Indonesia dipengaruhi secara negatif oleh pertumbuhan ekonomi. Temuan serupa dilaporkan oleh Damayanti (2022), yang penelitiannya menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi mempengaruhi secara negatif defisit APBN Indonesia.

Pembangunan ekonomi sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara (Rahmi et al., 2022; Wardana, 2016). Pelaksanaan APBN adalah contoh pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah. APBN adalah kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis untuk mencapai tujuan stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Prasetyia, 2011; Rustam & Said, 2018).

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan utama suatu negara. Pendapatan nasional, contoh indikator pertumbuhan ekonomi, mencerminkan aktivitas ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam konteks ini, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab besar untuk mempercepat kemajuan ekonomi bangsa. Kegiatan ekonomi ini akan meningkatkan pendapatan nasional secara langsung, mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang negara.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui berbagai kriteria, diantaranya kelestarian (*sustainability*), daya guna , dan keampuan. Belanja dapat dianggap berkelanjutan jika secara keseluruhan sesuai dengan rangka ekonomi makro tempo pertengahan yang menghasilkan taktik kerugian dan utang yang berkesinambungan . Belanja negara dinyatakan efisien jika berpotensi meraih produk keutamaan pengembangan yang telah diputuskan dengan penempatan belanja yang tidak boros. Penempatan tersebut harus berhasil meraih sasaran program pembangunan nasional yang telah ditentukan. Sementara itu, ukuran lainnya adalah efektivitas. Di samping itu , efektivitas lebih menegaskan pada dampak , sehingga aktivitas yang didanai harus menghasilkan output dan outcome yang berkualifikasi. Ini berarti belanja yang diwujudkan

harus menawarkan faedah yang terbaik untuk publik dan berpengaruh baik bagi perekonomian. Melihat situasi di atas, perlu diteliti apakah ketentuan belanja negara yang telah diterapkan oleh kekuasaan selama ini berwibawa kepada pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Para ekonomi telah lama memperhatikan hubungan teoritis antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, terutama pada saat ekonomi sedang lesu, menurut teori Keynesian. Diperkirakan bahwa pengeluaran negara, baik untuk modal, produk, maupun karyawan, dapat meningkatkan investasi, merangsang permintaan agregat, dan akhirnya mempercepat pertumbuhan ekonomi (Abimanyu, 2015; Hutahaean, 2019; Sadli, Mallongi, & Zakaria, 2022).

Alat kebijakan fiskal utama pemerintah untuk mencapai pemerataan ekonomi, tujuan pembangunan nasional, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Abimanyu, 2015; Nasution, 2025). Menurut teori ekonomi publik, APBN berfungsi sebagai alat distribusi dan stabilisasi ekonomi selain alokasi sumber daya (Nasution, 2025). Peran APBN sebagai otorisasi, perencanaan, pemantauan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi mencerminkan fungsi-fungsi ini (Kurniawan, 2024).

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan di Indonesia, belanja pemerintah melalui APBN berpengaruh signifikan terhadap ekspansi ekonomi. Analisis kointegrasi dan kausalitas digunakan oleh Hutahaean (2019) untuk menunjukkan adanya korelasi berkelanjutan antara belanja negara dan PDB. Sementara itu, Andari dkk. (2024) menegaskan pentingnya pengelolaan APBN yang efektif dan efisien agar belanja negara benar-benar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu pokok bahasan utama dalam gagasan pengelolaan keuangan negara adalah efektivitas dan efisiensi pengelolaan APBN. Lestari, Bagia, dan Jana (2018) menegaskan bahwa proyek prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat harus mendapatkan sebagian besar dana langsung pemerintah daerah yang bersumber dari APBN. Hal ini sejalan dengan pendapat Lona, Persevaranda, dan Manafe (2023) yang menegaskan perlunya mengkaji efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran agar pencapaian tujuan pembangunan dapat tercapai secara maksimal.

Selain itu, salah satu isu utama dalam teori keuangan publik kontemporer adalah pengawasan dan keterbukaan pengelolaan APBN. Menurut Solissa dan Pangestoeti (2025), efektivitas pengawasan APBN sangat penting untuk mencegah terjadinya anomali anggaran yang dapat merugikan negara dan menghambat kemajuan ekonomi. Agar tata kelola APBN dapat terbuka dan akuntabel, sistem pengawasan harus diperkuat baik melalui keterlibatan masyarakat maupun proses internal pemerintah (Rahmayanti dkk., 2025).

Dari sudut pandang ekonomi Islam, keadilan distributif dan maslahah (kepentingan umum) harus menjadi landasan pengelolaan APBN (Kurniawan, 2024; Mulyawan & Alia, 2020). Anggaran negara dipandang sebagai amanah yang harus dikelola secara adil, efektif, dan terbuka untuk kemaslahatan umum, selain sebagai instrumen keuangan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), peraturan perundang-undangan terkait APBN, serta literatur dari jurnal dan dokumen akademik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur untuk menggali korelasi antara belanja negara dan pertumbuhan ekonomi nasional. Data dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta hambatan dalam pengelolaan anggaran negara. Penelitian ini juga mengkaji pendekatan normatif melalui pandangan hukum positif dan perspektif ekonomi Islam terhadap pengelolaan APBN.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Anggaran, menurut Basri (2005), adalah ringkasan atau pernyataan komprehensif tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diantisipasi untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Rahardja dan Manurung (2004) mendefinisikan defisit anggaran sebagai anggaran yang dimaksudkan untuk mengalami defisit karena pengeluaran pemerintah diantisipasi melebihi penerimaan pemerintah ( $G > T$ ). Pemerintah sering mengadopsi anggaran defisit ini ketika ingin mendorong perluasan ekonomi. Biasanya, ketika ekonomi sedang sulit, langkah ini diambil.

Anggaran, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2009:61), adalah sebuah pernyataan perkiraan mengenai penampilan yang ingin diraih dalam jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam skala keuangan. Singkatnya, anggaran (budget) adalah gagasan aktivitas suatu perkumpulan yang dituangkan dalam bentuk tercatat dan dinyatakan secara

numerik, biasanya dalam bentuk uang, barang, dan jasa untuk periode tertentu. Efisiensi, menurut Mardiasmo (2009:132), sangat berkaitan dengan gagasan produktivitas, yaitu ketika suatu output dapat dicapai dengan penggunaan input yang seminimal mungkin. Sebuah proses operasional dapat dianggap efisien jika pencapaian diperoleh dengan penggunaan aset dan modal yang serendah-rendahnya (spending well).

Perkembangan APBN di Indonesia dapat dilihat dari pos-pos yang terdapat dalam anggarannya. Sisi penerimaan negara meliputi seluruh pemasukan dari cukai dan non-cukai, sedangkan sisi pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran untuk pembangunan. Terdapat beberapa pilihan untuk meraih tujuan tersebut, yaitu dengan meningkatkan pemasukan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri, serta menegaskan pengeluaran negara melalui penerapan ukuran keutamaan yang tinggi. Saat ini, salah satu fokus utama pemerintahan yang sedang berjalan adalah pemberantasan korupsi.

Berdasarkan informasi dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, terungkap bahwa kerugian negara akibat penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp. 8,2 triliun. Kasus ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pengadaan barang dan jasa, dana desa, serta belanja pegawai. Salah satu contoh nyata dari kasus ini adalah penyimpangan dana desa di Kabupaten OKU Timur yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 357 juta (BPK, 2024). Permasalahan yang berkaitan dengan penyimpangan anggaran negara ini tentu harus segera ditangani mengingat besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi negara. Hal ini jelas menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga infrastruktur yang mendukung kesejahteraan menjadi tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan yang lebih efektif terhadap APBN yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya penyimpangan anggaran negara.

Dalam konteks negara, pengeluaran negara merupakan salah satu instrumen aturan moneter yang paling signifikan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola perekonomian, meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam teori pembangunan ekonomi, terdapat hubungan timbal balik yang positif antara pengeluaran negara dan PDB. PDB berfungsi sebagai indikator yang mencerminkan nilai penghasilan produk dan layanan di suatu negara, yang terdiri dari penggunaan domestik, investasi, pengeluaran pemerintah, dan pengiriman bersih. Pengeluaran negara mencakup semua pengeluaran pemerintah dalam satu tahun anggaran, yang terbagi menjadi pengeluaran pemerintah pusat dan transfer ke daerah.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pengeluaran negara mencakup: pengeluaran pegawai, pengeluaran barang, pengeluaran dana, pembayaran bunga, bantuan, hadiah, bantuan sosial, pengeluaran lainnya, dan pemindahan ke daerah.

Nilai keseluruhan produk dan layanan yang dihasilkan oleh fasilitas produksi suatu negara selama periode waktu tertentu adalah PDB-nya. PDB adalah ukuran ekspansi ekonomi. Di sisi lain, pengeluaran negara meliputi semua pengeluaran negara dalam satu tahun fiskal, yang menguras dana modal saat ini dan menjadi kewajiban negara yang tidak akan diganti oleh negara. Peran APBN menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran otorisasi, yang berarti bahwa anggaran negara berfungsi sebagai fondasi untuk mengerjakan penghasilan dan pengeluaran pada tahun yang relevan.
- b. Peran perencanaan, yang berarti bahwa negara dapat berfungsi sebagai acuan dalam merencanakan aktivitas untuk tahun tersebut.
- c. Peran pengawasan, makna anggaran negara seharusnya menjadi acuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan aktivitas pemerintahan negara sesuai dengan peraturan.
- d. Peran alokasi menunjukkan bahwa anggaran negara perlu ditujukan untuk mengurangi tingkat pekerja yang menganggur dan pemborosan aset, serta untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan perekonomian.
- e. Peran distribusi, menunjukkan bahwa strategi anggaran negara perlu mempertimbangkan rasa kesetaraan dan kesesuaian
- f. Peran stabilisasi menunjukkan bahwa anggaran pemerintah berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan dan berusaha mencapai harmoni mendasar dalam perekonomian.

Kebijakan anggaran negara yang tercantum dalam APBN adalah elemen penting dari perilaku ekonomi secara keseluruhan, sehingga perubahan dalam APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Secara umum, dampak dari kebijakan.

Dalam pengelolaan anggaran negara, penerapan transparansi oleh pemerintah sangatlah penting. Hal ini disebabkan oleh sifat wajib transparansi, yang dapat membantu dan meningkatkan efektivitas pengawasan anggaran negara untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap APBN. Selain itu, penerapan sistem transparansi juga berpotensi meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat. Meskipun telah ada upaya untuk

memperbaiki pengelolaan keuangan negara melalui penerapan teknologi pengawasan, seperti e-budgeting dan e-audit, masih banyak ditemukan penyimpangan yang merugikan negara. Penyimpangan ini terjadi di berbagai sektor, termasuk dana desa, pengadaan barang dan jasa, serta belanja pegawai.

Maka, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia, APBN sudah tepat sebagai representasi pengelolaan keuangan negara Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan pemerintah seharusnya didasarkan pada maslahah bagi rakyatnya, sesuai dengan kaidah fikih:

بِالْمَصْلَحَةِ مَنْوَطُ الرَّاعِيَةِ عَلَى الْإِمَامِ تَصْرُّفُ

Artinya: "Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah," (As-Suyuthi 1990).

Pemerintah biasanya menerapkan kebijakan fiskal ketika kekuatan pasar dianggap tidak cukup untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Kebijakan fiskal ini termasuk dalam bentuk belanja negara. Mankiw (2014) dan Parkin (2014) mengemukakan bahwa belanja negara, yang merupakan salah satu instrumen klasik pemerintah, dianggap efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Sukirno (1985) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan dalam level aktivitas ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Sebuah perekonomian dianggap menjalani perkembangan jika derajat aktivitas ekonominya unggul dibandingkan dengan yang telah diraih dalam kurun waktu sebelumnya, sementara kecepatan perkembangan ekonomi merujuk pada peningkatan dalam PDB tanpa mempertimbangkan apakah peningkatan tersebut lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan tahap perkembangan populasi.

Perkembangan ekonomi adalah penanda penting yang menunjukkan baik atau buruknya perekonomian suatu bangsa dan merupakan aspek krusial dalam kemajuan bangsa . Pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan aktivitas yang mengakibatkan jumlah produk dan layanan yang dihasilkan dalam masyarakat meningkat serta kesejahteraan masyarakat bertambah (Sukirno, 2002). Perekonomian yang sempurna adalah perekonomian yang berkesinambungan berkembang tanpa mengalami penurunan dalam satu tahun atau bahkan satu triwulan. Oleh karena itu perekonomian tersebut akan menciptakan stabilitas nilai dan membuka peluang pekerjaan yang ekstensif . Tetapi, dalam praktiknya, keadaan perekonomian umumnya mengalami fluktuasi.

Pertumbuhan ekonomi mengukur sejauh mana kegiatan ekonomi dapat membawa lebih banyak uang bagi publik dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan ekonomi pada

hakikatnya adalah prosedur yang menggunakan komponen-komponen produksi untuk menghasilkan output, yang pada gilirannya menghasilkan arus imbalan bagi elemen-elemen pendapatan masyarakat (Basri, 2010). Pendapatan masyarakat sebagai pemilik elemen-elemen produksi diprediksi akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Jika total kompensasi riil yang diperoleh dari penggunaan elemen-elemen pendapatan pada tahun tertentu lebih besar dari tahun terdahulu, maka perekonomian disebut sedang berkembang.

## 5. KESIMPULAN

APBN adalah sarana yang sangat penting dalam meraih sasaran pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan belanja negara harus menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk menghindari kerugian negara. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan APBN, termasuk pemanfaatan teknologi informasi yang efisien, untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Diperlukan kolaborasi antara regulasi fiskal, komitmen politik, dan partisipasi masyarakat agar APBN dapat berfungsi sebagai instrumen yang benar-benar mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dengan memperkuat akuntabilitas dan mengedepankan prinsip keadilan sosial, pengelolaan APBN akan menjadi landasan yang kokoh bagi Indonesia dalam mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan

Berdasarkan evaluasi dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi nasional melalui peningkatan belanja negara yang efektif dan efisien. Belanja negara terbukti menjadi instrumen kebijakan fiskal yang strategis untuk mempertinggi Produk Domestik Bruto (PDB), menurunkan tingkat pengangguran, dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun, efektivitas APBN dalam mencapai tujuan tersebut sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Temuan penyimpangan anggaran yang dilaporkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang ada masih belum optimal dan transparansi dalam pengelolaan anggaran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan, penerapan sistem digital seperti e-budgeting dan e-audit secara konsisten, serta keterbukaan informasi kepada publik menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola APBN yang baik. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan APBN juga harus mempertimbangkan asas kemaslahatan atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Dengan demikian, melalui pengelolaan APBN yang transparan,

efisien, dan berkeadilan, pemerintah dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan perbaikan kemakmuran komunitas secara meragam di seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

Abimanyu, Y. (2015). *Dampak pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Dampak\\_pengeluaran\\_pemerintah\\_terhadap\\_pertumbuhan\\_ekonomi.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/Dampak_pengeluaran_pemerintah_terhadap_pertumbuhan_ekonomi.pdf)

Andari, R. P., Yanto, S., N, D. A., & Prasetyo, H. (2024). Implementasi pengelolaan 8 APBN guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(11), 4409–4414.

Husriah. (2020). Pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Economic*, 8(2), (Edisi Desember).

Hutahaean, P. (2019). Belanja negara dan pertumbuhan ekonomi Indonesia: Analisis kointegrasi dan kausalitas. *Kajian Ekonomi & Keuangan*, 3(2), 104–117. <https://doi.org/10.31685/kek.v3i1.411>

Juanda, B., & Gladiola, S. (2022). Analisis keberlanjutan serta pengaruh surat berharga negara dan faktor lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 7(3), 239–254.

Kurniawan, R. R. (2024). Anggaran pendapatan dan belanja negara dalam perspektif keuangan syariah. *Journal of Halal Economy and Sharia Management (JHESM)*. <https://doi.org/10.38035/jhesm.v2i2.176>

Lestari, N. N. S. A., Bagia, I. W., & Jana, G. P. A. S. (2018). Pengaruh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terhadap belanja langsung pada pemerintah daerah kabupaten/kota. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 4(1), 24–30. <https://doi.org/10.23887/bjm.v4i1.21974>

Lona, S. S., Persevaranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja. *Riset Jurnal Akuntansi*, 7(1), [tidak tersedia halaman]. [Pastikan nomor halaman dan DOI jika tersedia]

Magadhendra, F., Soebagyo, D., & Hasmarini, M. I. (2025). Pengaruh kebijakan fiskal terhadap defisit APBN di Indonesia tahun 2007–2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1255–1260.

Mulyawan, W., & Alia, W. (2020). APBN dan pendapatan nasional. *SALAM: Islamic Economics Journal*, 1(2), 59–67. ISSN 2723-5955 (Online); 2745-7478 (Cetak).

Nasution, J. (2025). *Ekonomi publik*. Medan: FEBI UIN SU Press.

Pradana, I. (2024). *Analisis pengaruh anggaran pendapatan dan belanja desa terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan Indeks Desa Membangun sebagai variabel moderasi* (Disertasi Doktor, Universitas Sebelas Maret).

Rahmayanti, V., Salasa, A. P., & Sari, R. I. (2025). Menyelami APBN Indonesia: Potret anggaran dan analisis perkembangan dari periode ke periode. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(1), 328–337.

Sadli, M., Mallongi, S., & Zakaria, J. (2022). Analisis pengaruh belanja negara dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Journal of Accounting Finance*, 3(2), [April]. <https://doi.org/10.52103/jaf.v3i2.931>

Solissa, A. A., & Pangestoeiti, W. (2025). Efektivitas pengawasan APBN dalam mencegah penyimpangan anggaran. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(5), 1619–1626.